

PENINGKATAN LITERASI PROGRAM DOKTORAL AGRIBISNIS BAGI PEMBUAT KEBIJAKAN GUNA MENDUKUNG KEUNGGULAN SDM PERTANIAN

Sri Mardiyati^{1*}, Ratnawati Tahir², Syafiuddin³, Mohammad Natsir⁴, Irma Sribianti⁵,
Akhmad⁶, Zulkifli⁷, Jumiaty⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Doktor Agribisnis, Program Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: sri.mardiyati@unismuh.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi dan motivasi pembuat kebijakan mengenai relevansi, kurikulum, peluang studi, dan agenda riset strategis Program Doktor Agribisnis. Mitra kegiatan adalah aparatur Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto yang sebagian besar berpendidikan Sarjana dan Magister, sehingga penguatan kapasitas akademik dipandang penting untuk mendukung kebijakan pertanian dan ketahanan pangan berbasis bukti. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi partisipatif, dialog interaktif, dan klinik konsultasi akademik dua arah dengan dukungan presentasi serta media leaflet. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, pencatatan pertanyaan, wawancara singkat, dokumentasi, dan formulir komitmen/minat studi lanjut. Hasil menunjukkan bahwa dialog berkembang dari informasi administratif program doctoral menuju isu substantif, terutama pemanfaatan riset doctoral untuk mendukung perencanaan dan kebijakan daerah serta kebutuhan kajian hilirisasi komoditas pertanian. Kegiatan juga mengidentifikasi peluang awal kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi pendidikan doctoral berbasis persoalan lokal dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan kapasitas analitis aparatur dan pembentukan agenda riset kebijakan. Kegiatan berkontribusi terhadap pembelajaran sepanjang hayat (SDG4) dan secara tidak langsung mendukung penguatan ketahanan pangan daerah (SDG2).

Kata kunci: Literasi Pendidikan Doktor, Agribisnis, Pembuat Kebijakan, SDM Pertanian, Ketahanan Pangan.

LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, teknologi produksi, dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pada level pemerintah daerah, aparatur yang bekerja pada organisasi perangkat daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan mempunyai posisi strategis karena mampu menerjemahkan agenda pembangunan ke dalam kebijakan, program, pelayanan, penyuluhan, dan intervensi yang sesuai dengan karakter wilayah. Kompleksitas persoalan pertanian, mulai dari produktivitas, perubahan iklim, dinamika pasar, regenerasi pelaku usaha tani, transformasi digital, sampai ketahanan pangan, menuntut kemampuan analitis, kepemimpinan, riset, dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang semakin kuat. Literatur menunjukkan bahwa kapasitas SDM aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pertanian dan pangan.

Studi implementasi program ketahanan pangan di Blitar dan Subang menunjukkan bahwa kompetensi dan ketersediaan SDM memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, sedangkan keterbatasan jumlah tenaga, fasilitas, anggaran, dan keahlian dapat menghambat pencapaian program (Alfia, 2016; Yuhana, 2020). Kajian Program Unggulan Pertanian di Ogan Ilir juga menegaskan bahwa keterbatasan tenaga, fasilitas, dan sumber daya berdampak pada kinerja program pertanian daerah (Simatupang et al., 2023). Sementara itu, implementasi Kostratani menempatkan kelembagaan penyuluhan, pusat data dan informasi, pusat pembelajaran, konsultasi agribisnis, serta koordinasi lintas sektor sebagai unsur penting dalam pembangunan pertanian (Izmi et al., 2021). Perkembangan layanan penyuluhan berbasis digital seperti e-Pusluh semakin mempertegas kebutuhan aparatur yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga literasi digital dan kemampuan mengelola layanan publik berbasis informasi (Oktavianti et al., 2024).

Pendidikan lanjut menjadi salah satu jalur strategis untuk memperkuat kapasitas profesional aparatur melalui pengembangan kemampuan metodologis, analisis kebijakan, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Pendidikan doktoral bidang agribisnis relevan secara potensial karena mempertemukan perspektif ekonomi, manajemen, kelembagaan, kebijakan, rantai nilai, dan sistem pangan dalam kerangka ilmiah. Peningkatan literasi mengenai Program Doktor Agribisnis bagi pembuat kebijakan karena itu dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda pengembangan SDM pertanian yang lebih luas, bukan sekadar promosi program pendidikan. Literasi tersebut dapat membuka pemahaman tentang budaya belajar lanjut, orientasi riset, jejaring ilmiah, serta peluang membangun keputusan yang lebih terinformasi. Literatur mengenai peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kompetensi aparatur menegaskan bahwa pembelajaran yang berkelanjutan dan relevan dengan pekerjaan dapat memperkuat profesionalisme serta kemampuan organisasi merespons perubahan (Hani, 2020; Megalia & Makmun, 2017; Sudewo, 2023). Bagi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, investasi pada kualitas aparatur memiliki makna ganda, yakni meningkatkan kapasitas individual sekaligus memperkuat institusi pemerintah dalam merumuskan program yang responsif terhadap persoalan pangan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga membuka ruang transfer pengetahuan, penyusunan riset terapan, pemanfaatan data, dan pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, literasi pendidikan doktoral dapat berfungsi sebagai pintu masuk untuk mempertemukan kebutuhan pengembangan aparatur dengan kapasitas akademik perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Penguatan kapasitas semacam ini menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah harus menghadapi tuntutan efisiensi anggaran, akuntabilitas publik, dan kebutuhan menyelaraskan kebijakan pertanian dengan sasaran pembangunan berkelanjutan. Aparatur yang memiliki literasi akademik dan riset yang baik berpeluang lebih siap menilai kualitas informasi, memahami risiko kebijakan, serta membangun komunikasi lintas sektor dengan petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah aparatur Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jenepono yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional atau penyuluh, dan staf teknis. Berdasarkan informasi awal mitra, sebagian besar SDM pada kedua perangkat daerah tersebut masih berpendidikan Sarjana dan Magister.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kompetensi aparatur, tetapi memperlihatkan masih terbukanya ruang pengembangan kapasitas akademik dan profesional pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya bagi personel yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, penyuluhan, dan evaluasi kebijakan pertanian serta ketahanan pangan. Persoalan utama yang diidentifikasi bukan hanya jenjang pendidikan, melainkan belum optimalnya literasi mengenai relevansi pendidikan doktoral agribisnis terhadap tugas birokrasi, struktur kurikulum yang dapat menunjang kapasitas kebijakan, peluang riset yang dapat diarahkan pada persoalan daerah, serta kemungkinan kolaborasi ilmiah antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Dalam pembangunan pertanian, kebutuhan tersebut menjadi mendesak karena kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan aparatur memahami persoalan secara sistemik dan menghubungkan data, teori, pengalaman lapangan, serta kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi dan motivasi para penentu kebijakan mengenai relevansi, kurikulum, serta peluang riset strategis Program Doktor Agribisnis. Target utama kegiatan adalah meningkatnya komitmen aparatur untuk melanjutkan studi lanjut serta terbukanya peluang kolaborasi riset strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah guna mewujudkan keunggulan SDM pertanian di Kabupaten Jeneponto. Tujuan tersebut menempatkan literasi program doktoral bukan sebagai promosi pendidikan semata, melainkan sebagai intervensi awal untuk memperluas wawasan aparatur tentang pilihan pengembangan kompetensi, memperkuat orientasi terhadap riset, dan membangun kesadaran bahwa persoalan pertanian daerah dapat dikaji secara lebih sistematis melalui pendekatan ilmiah. Kontribusi kegiatan diharapkan muncul pada dua ranah. Pada ranah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan membuka ruang pertukaran pengetahuan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, mengidentifikasi isu lokal yang potensial dikembangkan menjadi agenda riset doktoral, serta mendorong pemanfaatan pendekatan ilmiah dan bukti empiris dalam proses kebijakan. Pada ranah pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini berkontribusi terhadap SDG 4 melalui peningkatan akses informasi mengenai pendidikan lanjut dan penguatan semangat pembelajaran sepanjang hayat bagi aparatur, serta mendukung SDG 2 secara tidak langsung melalui penguatan kapasitas SDM yang berperan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pertanian serta ketahanan pangan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif, dialog interaktif, dan klinik konsultasi akademik dua arah. Pendekatan ini dipilih agar komunikasi antara tim pengabdian sebagai fasilitasi akademik dan para birokrat sebagai praktisi kebijakan dapat berjalan secara setara dan dinamis. Kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan menggandeng mitra strategis yang memegang otoritas penuh terhadap tata kelola pangan dan pertanian daerah. Khalayak sasaran atau peserta yang terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan ini berjumlah 32 orang, yang merupakan perwakilan pejabat struktural, pejabat fungsional (penyuluh pertanian), serta staf teknis di lingkup Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini disusun secara sistematis ke dalam tiga alur utama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan koordinasi intensif dan audiensi dengan pimpinan instansi terkait di Kabupaten Jeneponto. Proses ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengurus perizinan birokrasi, serta memetakan isu-isu agraria spesifik yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah. Data dari pemetaan ini kemudian diolah oleh tim untuk menyusun materi literasi program doktor yang kontekstual dengan kebutuhan lokal Jeneponto.
2. Tahap Pelaksanaan: Tahap ini diisi dengan pemaparan materi inti oleh tim pengabdian yang berfokus pada penguatan literasi Program Doktor Agribisnis. Materi yang disampaikan mencakup fleksibilitas kurikulum Program Doktor Agribisnis, pengenalan fokus riset terapan (manajemen rantai pasok, kelembagaan petani, dan hilirisasi produk), hingga strategi berburu skema beasiswa pemerintah (seperti LPDP dan BPI). Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif untuk membedah kendala riil, aspirasi, dan kekhawatiran yang dialami oleh para birokrat dalam melanjutkan studi lanjut.
3. Tahap Evaluasi: Evaluasi keberhasilan kegiatan diukur menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Indikator keberhasilan dinilai berdasarkan tingkat kehadiran peserta (keterwakilan 32 SKPD), kedalaman substansi pertanyaan yang diajukan selama sesi dialog interaktif, serta pencatatan formulir komitmen minat awal para aparatur untuk melakukan kolaborasi riset maupun melanjutkan studi formal di jenjang doktoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dan respons peserta terhadap literasi Program Doktor Agribisnis

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif aparatur Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dalam proses literasi Program Doktor Agribisnis. Kegiatan dilakukan secara tatap muka melalui pemaparan materi, dialog interaktif, dan konsultasi akademik dua arah dengan dukungan media presentasi serta leaflet Program Doktor Agribisnis. Media tersebut menyediakan informasi mengenai orientasi program, visi dan misi, proses pendaftaran, pembiayaan pendidikan, serta akses informasi lanjutan. Temuan yang menonjol selama pelaksanaan bukan hanya perhatian peserta terhadap informasi administratif pendidikan doktoral, tetapi berkembangnya diskusi menuju relevansi pendidikan doktoral dengan tugas aparatur pemerintah daerah. Suasana dialog menjadi dinamis ketika peserta menghubungkan materi dengan persoalan kebijakan pertanian yang dihadapi dalam pekerjaan.

Munculnya pertanyaan yang bersifat substantif mengenai manfaat riset doktoral bagi penyusunan kebijakan serta kemungkinan menjadikan persoalan agribisnis daerah sebagai topik penelitian menunjukkan bahwa kegiatan mampu membuka ruang refleksi mengenai fungsi studi lanjut di luar kepentingan memperoleh jenjang akademik. Temuan ini dapat dipandang sebagai indikasi kualitatif berkembangnya literasi peserta mengenai Program Doktor Agribisnis. Temuan empiris yang lebih tepat adalah adanya perubahan kedalaman diskusi dari informasi program menuju relevansi akademik, riset, dan kebijakan. Dengan demikian, edukasi partisipatif dan dialog interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk mengaitkan pendidikan doktoral dengan kebutuhan profesional sekaligus persoalan strategis pembangunan pertanian Kabupaten

47

Jeneponto.

Temuan tersebut selaras dengan literatur yang menempatkan pembelajaran berkelanjutan, literasi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur sebagai proses yang perlu dikaitkan dengan pekerjaan nyata. Pendekatan *learning in the flow of work* menekankan bahwa pembelajaran menjadi lebih relevan ketika pengetahuan baru langsung dikaitkan dengan tugas dan masalah pekerjaan, sehingga aparatur tidak sekadar menerima informasi, tetapi menginterpretasikan dalam organisasinya (Sudewo, 2023). Literatur mengenai pengembangan kompetensi aparatur juga menekankan perlunya pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan untuk membentuk profesionalisme serta kemampuan merespons perubahan kebutuhan organisasi (Megalia & Makmun, 2017).



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan literasi Program Doktor Agribisnis di Kabupaten Jeneponto

Dalam bidang pertanian, literasi informasi dapat memperkuat kapasitas aktor untuk mengakses, menginterpretasikan, dan memanfaatkan pengetahuan dalam pengambilan keputusan dan pendampingan masyarakat (Junaidi, 2022). Respons peserta dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa literasi Program Doktor Agribisnis menjadi lebih bermakna ketika tidak hanya berisi informasi penerimaan mahasiswa, tetapi dikontekstualisasikan dengan problem yang dikenal peserta. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pendidikan doktoral perlu dibangun berdasarkan relevansi sosial dan kebutuhan pembangunan. Jowi (2021) serta Molla dan Cuthbert (2016) menempatkan penguatan pendidikan doktoral sebagai bagian dari pembangunan kapasitas penelitian yang relevan dengan persoalan lokal. Prinsip relevansi lokal mendukung interpretasi bahwa penyampaian informasi doktoral yang dikaitkan dengan persoalan pekerjaan dapat meningkatkan makna pembelajaran bagi aparatur. Dengan demikian, pengalaman kegiatan ini mengindikasikan bahwa dialog berbasis masalah merupakan pendekatan penting dalam memperkenalkan pendidikan lanjut kepada pembuat kebijakan.

Relevansi riset doctoral bagi kebijakan daerah berbasis bukti

Temuan kedua muncul dari dialog mengenai pemanfaatan hasil penelitian doctoral dalam proses kebijakan pemerintah daerah. Peserta yang berkaitan dengan bidang perencanaan mempertanyakan manfaat praktis disertasi bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dinas dan agenda pembangunan daerah. Pertanyaan tersebut menjadi titik penting karena memperlihatkan bahwa peserta mulai menilai studi doctoral berdasarkan kemampuan penelitian yang dapat memberikan nilai tambah bagi pekerjaan pemerintahan. Dalam dialog, tim pengabdian menjelaskan bahwa penelitian doctoral dapat dirancang untuk menjawab persoalan aktual daerah melalui pengumpulan data yang sistematis, analisis yang mendalam, evaluasi alternatif kebijakan, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti. Hasil penelitian tersebut tidak diposisikan sebagai pengganti prosedur formal dalam penyusunan regulasi atau dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi salah satu sumber bukti ilmiah dan bahan akademik yang memperkuat formulasi renstra, program kerja, maupun kebijakan sektoral. Perspektif tersebut memperoleh respons karena memungkinkan peserta memahami bahwa tema disertasi dapat bersumber langsung dari persoalan yang dihadapi dalam tugas kedinasan.

Pendidikan doctoral mulai dipersepsikan bukan hanya sebagai investasi individual dalam karier, tetapi sebagai kemungkinan pengembangan kapasitas institusional pemerintah daerah. Dialog juga memperlihatkan pentingnya kemampuan menghubungkan riset dengan kebutuhan kebijakan. Aparatur yang mampu mengidentifikasi masalah, menggunakan data, membandingkan alternatif intervensi, dan mengevaluasi konsekuensi kebijakan berpotensi memperkuat proses *evidence-based policymaking*. Temuan ini merupakan hasil penting kegiatan karena literasi pendidikan doctoral berkembang ke arah pemahaman mengenai hubungan antara aktivitas akademik dan praktik pemerintahan. Truax (2023) menunjukkan pentingnya mekanisme yang menjembatani penelitian dengan sektor publik sehingga pengetahuan akademik dapat diterjemahkan menjadi masukan bagi proses kebijakan. Kajian mengenai pendidikan doctoral selanjutnya menunjukkan bahwa penguatan kapasitas riset dapat mendukung produksi pengetahuan yang lebih relevan dengan persoalan pembangunan apabila desain pendidikan terhubung dengan kebutuhan lokal (Jowi, 2021; Manzeke-Kangara et al., 2024; Molla & Cuthbert, 2016).

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa gelar doktor tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Infrastruktur penelitian, jalur karier, dukungan institusi, pendanaan, dan mekanisme translasi pengetahuan tetap diperlukan agar kompetensi analitis dapat digunakan dalam lingkungan pemerintahan (OECD, 2021, 2023; Truax, 2023). Dengan demikian, hasil dialog di Jeneponto lebih tepat dipahami sebagai terbukanya perspektif baru mengenai pendidikan doctoral sebagai salah satu sarana penguatan kemampuan riset dan kebijakan, bukan sebagai jaminan otomatis terhadap peningkatan mutu kebijakan daerah.

Peluang kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah

Terbukanya ruang untuk mengembangkan hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui agenda penelitian yang berangkat dari persoalan pembangunan pertanian setempat. Dialog mengenai pemanfaatan riset doctoral untuk renstra dan kebijakan, serta pembahasan mengenai hilirisasi, memperlihatkan adanya titik temu antara kapasitas akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan analitis Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Dalam kegiatan ini, kolaborasi tersebut masih berada pada tahap awal berupa pertukaran gagasan dan identifikasi peluang penelitian; oleh karena itu, temuan tidak diartikan sebagai telah terbentuknya kerja sama formal. Meskipun demikian, kemunculan tema penelitian dari peserta menunjukkan potensi untuk mengubah pola interaksi perguruan tinggi–pemerintah daerah dari kegiatan sosialisasi jangka pendek menjadi kemitraan pengetahuan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki akses terhadap persoalan empiris, pengalaman implementasi kebijakan, data administratif, dan pengetahuan mengenai karakteristik wilayah. Sebaliknya, perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik untuk mengembangkan desain penelitian, metodologi, analisis, dan sintesis bukti. Jika kedua sumber daya tersebut dipertemukan, penelitian doktoral dapat diarahkan pada isu yang memiliki relevansi praktis tanpa kehilangan kedalaman akademiknya. Dialog kegiatan menunjukkan kemungkinan agenda seperti rantai nilai, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi produk pertanian, manajemen risiko agribisnis, dan kebijakan ketahanan pangan. Dengan demikian, luaran kegiatan tidak terbatas pada literasi mengenai mekanisme studi, tetapi juga berupa identifikasi awal ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan riset, pendampingan, dan pembelajaran bersama.

Literatur mendukung pentingnya kemitraan tersebut dengan menempatkan universitas sebagai aktor dalam sistem inovasi dan kebijakan. Kontribusi perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui transfer pengetahuan dan keterlibatan dengan pemerintah serta pemangku kepentingan regional (Thorn & Soo, 2006). Truax (2023) menunjukkan bahwa hubungan yang terstruktur antara peneliti dan sektor publik dapat memperkuat konektivitas pada *research-policy interface*, khususnya ketika peneliti memahami kebutuhan kebijakan dan pemerintah memiliki akses langsung terhadap keahlian penelitian. Karena itu, tindak lanjut potensial dari kegiatan di Jeneponto adalah pemetaan tema riset bersama, identifikasi kebutuhan data, pengembangan skema penelitian kolaboratif, dan fasilitasi aparatur yang berminat melanjutkan studi dengan tema disertasi yang relevan terhadap pembangunan daerah.

Best practice dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs

Salah satu pencapaian yang dapat direkomendasikan sebagai best practice dari kegiatan ini adalah penggunaan literasi pendidikan doktoral berbasis persoalan lokal. Program tidak berhenti pada penyampaian informasi penerimaan mahasiswa, kurikulum, biaya, atau beasiswa, tetapi menggunakan dialog untuk menghubungkan informasi tersebut dengan problem riil yang dihadapi aparatur. Pendekatan ini menghasilkan dua perkembangan substantif: munculnya diskusi mengenai pemanfaatan penelitian dalam kebijakan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan promosi pendidikan dapat ditransformasikan menjadi forum pertukaran pengetahuan ketika peserta ditempatkan sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan masalah empiris. Praktik ini berpotensi direplikasi pada pemerintah daerah lain melalui tahapan pemetaan persoalan, literasi pendidikan lanjut, dialog berbasis masalah, identifikasi agenda riset, dan fasilitasi kolaborasi.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini terutama berkontribusi pada SDG 4 (*Quality Education*) melalui perluasan informasi pendidikan lanjut, pembelajaran sepanjang hayat, dan penguatan orientasi aparatur terhadap pengembangan kompetensi. Literatur menempatkan literasi, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jalur pendidikan doktoral sebagai bagian dari peningkatan kapasitas manusia dan organisasi (Elvy & Heriyanto, 2021; OECD, 2021, 2023).

50

Secara tidak langsung, kegiatan juga mendukung SDG 2 (*Zero Hunger*) karena diskusi diarahkan pada penguatan kapasitas aktor yang terlibat dalam kebijakan pertanian dan ketahanan pangan. Identifikasi persoalan hilirisasi dan rantai nilai memberikan jalur potensial bagi penelitian yang dapat mendukung penciptaan nilai tambah, penguatan kelembagaan, serta penyusunan kebijakan pangan yang lebih berbasis bukti.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian mengenai peningkatan literasi Program Doktor Agribisnis bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif, dialog interaktif, dan konsultasi akademik dua arah mampu membangun ruang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan aparatur Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Keterlibatan peserta tercermin dari berkembangnya diskusi dari informasi umum mengenai program doktoral menuju persoalan yang lebih substantif, terutama mengenai pemanfaatan riset doktoral untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah berbasis bukti dan pengembangan solusi atas permasalahan agribisnis lokal. Pendidikan doktoral mulai dipahami tidak semata-mata sebagai peningkatan jenjang akademik individual, tetapi sebagai salah satu jalur penguatan kapasitas analitis, riset, dan pemecahan masalah yang berpotensi mendukung pembangunan pertanian daerah. Kegiatan juga membuka ruang awal bagi kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui identifikasi persoalan yang dapat dikembangkan menjadi agenda penelitian strategis, seperti rantai nilai komoditas, hilirisasi hasil pertanian, kelembagaan petani, manajemen risiko agribisnis, dan kebijakan ketahanan pangan. Dengan demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan motivasi aparatur mengenai relevansi, kurikulum, dan peluang riset Program Doktor Agribisnis dapat dinilai tercapai pada tingkat kualitatif melalui munculnya respons substantif dan orientasi peserta terhadap pemanfaatan pendidikan lanjut bagi penyelesaian persoalan daerah. Secara lebih luas, kegiatan ini berkontribusi terhadap pembelajaran sepanjang hayat yang berkaitan dengan SDG 4 serta secara tidak langsung mendukung SDG 2 melalui penguatan kapasitas aktor yang berperan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Jeneponto.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 49–58. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.7>
- Elvy, E., & Heriyanto, H. (2021). Peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goal 4. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 42(1), 153. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.732>
- Fauzia, G., Elwamendri, E., Kurniasih, S., Ningsih, R., & Sativa, F. (2023). Advokasi ketahanan pangan di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.35912/jpu.v2i1.1862>
- Hani, A. (2020). Peningkatan mutu pembelajaran melalui kajian sistem pembelajaran di Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Ciawi–Bogor. *Jurnal Agrosainta Widyaaiswara Mandiri Membangun Bangsa*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.51589/ags.v4i2.3>

- Izmi, D. S., Yulaicho, M. R., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi kebijakan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 702–710. <https://doi.org/10.34007/jeHSS.v4i2.729>
- Jowi, J. O. (2021). Doctoral training in African universities: Recent trends, developments and issues. *Journal of the British Academy*, 9(s1), 159–181. <https://doi.org/10.5871/jba/009s1.159>
- Junaidi, H. (2022). Literasi informasi pertanian oleh komunitas pertanian perkotaan di laboratorium perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial. *Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 24(2), 161–170. <https://doi.org/10.37014/visipustaka.v24i2.2858>
- Manzeke-Kangara, M. G., Ligowe, I. S., Kaininga, B., Nalivata, P. C., Kabambe, V. H., Mbewe, E., Chishala, B. H., Sakala, G. M., Mapfumo, P., Mtambanengwe, F., Tendayi, T., Murwira, A., Chilimba, A. D., Phiri, F., Ander, E. L., Bailey, E. H., Lark, R. M., Millar, K., Watts, M. J., ... Broadley, M. R. (2024). Doctoral training to support sustainable soil geochemistry research in Africa. *Interface Focus*, 14(4). <https://doi.org/10.1098/rsfs.2023.0058>
- Megalia, R., & Makmun, T. A. S. (2017). Manajemen peningkatan kompetensi aparatur: Studi tentang implementasi kebijakan reformasi sumber daya kediklatan pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/jap.v17i1.6439>
- Molla, T., & Cuthbert, D. (2016). In pursuit of the African PhD: A critical survey of emergent policy issues in select sub-Saharan African nations, Ethiopia, Ghana and South Africa. *Policy Futures in Education*, 14(6), 635–654. <https://doi.org/10.1177/1478210316641567>
- OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>
- OECD. (2023). Promoting diverse career pathways for doctoral and postdoctoral researchers. <https://doi.org/10.1787/dc21227a-en>
- Oktavianti, R., Natsir, N., & Nuraisyah, N. (2024). Pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi e-Pusluh di bidang penyuluhan Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 2(3), 48–63. <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i3.723>
- Simatupang, E., Mardianto, M., & Junaidi, J. (2023). Implementasi kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di era pandemi COVID-19. *Pesirah: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.32>

- Sudewo, P. A. (2023). Implementasi learning in the flow of work pada lembaga pemerintah: Studi kasus di Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 8(2), 95–107. <https://doi.org/10.56971/jwi.v8i2.122>
- Taufik, A., Chaminra, T., Utami, I. R., Isnaad, A. D. P., Gaffar, D. E., & Rusman, M. R. (2021). Strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan pada masa pandemi di Kabupaten Majene. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 1(2), 178–194. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v1i2.7192>
- Thorn, K., & Soo, M. (2006). Latin American universities and the third mission: Trends, challenges, and policy options. *World Bank Policy Research Working Paper*, 4002. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4002>
- Truax, O. (2023). Building connectivity at the research-policy interface in Aotearoa through a public sector postdoctoral fellowship scheme. *New Zealand Science Review*. <https://doi.org/10.26686/nzsr.vi.8084>
- Yuhana, K. (2020). Implementasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Subang. *IJD-Demos*, 1(2). <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.22>